



## **Analisis Aktor dan Peristiwa dalam Pemberitaan Media Daring Tempo Terkait Politik Dinasti**

**Pirmansyah<sup>1,\*</sup>, Fahmy Lukman<sup>2</sup>, Nani Darmayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Pascasarjana, Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran  
Jl. Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia*

*\*Pirmansyah20001@mail.unpad.ac.id*

Received: 10 Mei 2025; Accepted: 12 Juni 2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jp.v9i2.367>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengungkap tentang keberadaan media Tempo yang telah menjadi representasi terkait dengan wacana politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai sebuah perusahaan media besar yang memiliki kredibilitas tinggi, Tempo memiliki ideologi dan sudut pandang tertentu terhadap pemerintahan Jokowi. Keberadaannya berperan untuk membentuk wacana tertentu; yang memungkinkan media ini membentuk sentimen dan citra positif atau negatif yang dinarasikan kepada publik pembaca. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas dua artikel berita daring Tempo dalam rubrik kolom dari 12 Mei 2023 - 22 Agustus 2024 yang diidentifikasi mengandung unsur wacana dan praktik sosial. Analisis teks dilakukan dengan menerapkan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) menurut Norman Fairclough, yang menegaskan bahwa teks sejatinya adalah wacana hidup sekaligus menggambarkan tentang praktik kekuasaan dan praktik sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pemberitaan mengenai politik dinasti, Tempo merepresentasikan dua dimensi utama, yakni dimensi aktor dan dimensi peristiwa. 1) Dimensi aktor: tokoh yang muncul dalam wacana politik dinasti meliputi Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, Anwar Usman, Kaesang Pangarep, dan Iriana Jokowi. 2) Dimensi peristiwa: aspek ini ditandai oleh penggunaan diksi-diksi seperti raja, asosiasi keluarga, cawe-cawe, paranoia, politik elektoral, dan politik tidak resmi (unofficial), yang memperkaya muatan evaluatif dan konotatif dalam teks.

**Kata Kunci:** Analisis Wacana Kritis; Dinasti Politik; Joko Widodo; Representasi; Tempo.

### *Abstract*

*This study aims to reveal the existence of Tempo media, which has become a representation related to the discourse of dynasty politics carried out by President Joko Widodo. As a large media company with high credibility, Tempo has a certain ideology and point of view regarding the Jokowi government. Its existence plays a role in forming a certain discourse, which allows this media to form positive or negative sentiments and images that are narrated to the reading public. In this study, the data used consisted of two online news articles from Tempo, which were identified as containing elements of discourse and social practice. Text analysis was carried out by applying the Critical Discourse Analysis (CDA) approach according to Norman Fairclough, which emphasizes that text is truly a living discourse as well as describing the practice of power and social practice. The results of the analysis show that in*

reporting on dynasty politics, *Tempo* represents two main dimensions, namely the actor dimension and the event dimension. 1) Actor dimension: figures that appear in the discourse of dynasty politics include Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, Anwar Usman, Kaesang Pangarep, and Iriana Jokowi. 2) Event dimension: this aspect is marked by the use of diction such as king, family association, cawe-cawe, paranoia, electoral politics, and unofficial politics, which enrich the evaluative and connotative content in the text.

**Keywords:** *Critical Discourse Analysis; Political Dynasty; Joko Widodo; Representation; Tempo*

## **A. Pendahuluan**

Rabu, 21 Agustus 2024, ketika sidang paripurna berlangsung, sebuah video Garuda biru tiba-tiba viral di banyak akun media sosial. Video dan foto Garuda Biru itu memuat tulisan “Peringatan Darurat” telah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat mendadak untuk membahas revisi UU Pilkada. Recananya revisi UU Pilkada itu akan menjadi bahan rapat paripurna sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi. Klip video tersebut pertama kali dibagikan akun kolaborasi Instagram @narasinewsroom, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv. Dalam video itu menampilkan lambang negara dengan latar biru dan berisikan teks “Peringatan Darurat”. Hal ini sebenarnya merupakan potongan unggahan dari kanal YouTube Emergency Alert System (EAS) Indonesia Concept (*Tempo.co*. 23 Agustus 2024).

Potongan video “Peringatan Darurat” telah digunakan publik sebagai simbol penolakan terhadap rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada Serentak 2024. Aksi ini pada hakikatnya telah mencerminkan akumulasi rasa kekecewaan publik Indonesia terhadap keputusan Badan Legislasi DPR yang dinilai menentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXVII/2024. Hal ini disebabkan bahwa revisi yang diusulkan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengakomodasi amar putusan MK, melainkan justru mempertentangkannya.

Salah satu poin penting yang kontroversial adalah ketentuan batas usia minimal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pasal 7 UU Pilkada. Alih-alih mengacu pada putusan MK yang mensyaratkan batas usia saat pendaftaran, Badan Legislatif DPR telah memilih meniru putusan Mahkamah Agung, sehingga batas usia ditentukan saat pelantikan. Kebijakan ini bertentangan dengan logika putusan MK yang menegaskan perlunya kepastian syarat administratif sejak awal proses pendaftaran.

DPR berencana mengubah ambang batas pencalonan bagi partai politik. Revisi tersebut hanya membebaskan partai tanpa kursi di DPRD dari syarat 20% kursi atau 25% suara pada pemilu sebelumnya, sementara partai yang sudah memiliki kursi tetap wajib memenuhi ketentuan ambang tersebut. Padahal, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sendiri telah melonggarkan threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta Pemilu 2024 (*Kompas.co*. 1 Maret 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menjadikan isu tentang politik dinasti sebagai objek kajian. Pertama, Gunanto (2020) dengan judul “Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia”. Penulis membahas produk-produk hukum dan dokumen yang merefleksikan tentang relasi kuasa dalam praktik politik dinasti. Data dikumpulkan melalui studi literatur, meliputi peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pilkada, buku dan jurnal terkait praktik politik dinasti, serta opini dan pemberitaan media masa.

Kedua, Dedi (2022) “Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi”. hasil penelitian menguraikan konsep teori politik dinasti dan implementasinya dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Dengan metode deskriptif-analitis, peneliti menelaah tentang pelaksanaan praktik politik dinasti yang mencerminkan kelemahan pendidikan politik masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa maraknya politik dinasti menandakan rendahnya tingkat pemahaman politik demokratis, meski teori dan pendekatan penelitian ini berbeda dengan penulis. Perbedaan itu terkait dengan basis ilmu politik pemerintahan, sementara penelitian yang penulis lakukan berbasis linguistik dengan menggunakan perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

Ketiga, (Aulia et al. 2023) “Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption” memfokuskan pembahasan pada politik dinasti keluarga Jokowi melalui kerangka patologi birokrasi dan grand corruption. Pendekatan ini memandang politik dinasti sebagai regenerasi kekuasaan untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Berbeda dengan penelitian mereka yang berbasis birokrasi pemerintahan, kajian penulis menggunakan teori linguistik dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis melihat urgensi untuk meneliti wacana politik dinasti dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis, karena isu ini sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan memunculkan gelombang penolakan, baik langsung maupun melalui aksi masa.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman penulis tentang penerapan teori linguistik pada peristiwa sosial-politik kontemporer. Memberikan kontribusi pada masyarakat melalui kajian bahasa, dengan menunjukkan bahwa analisis wacana dapat membuka perspektif baru dalam menilai fenomena publik.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap representasi aktor dan peristiwa dalam pemberitaan politik dinasti oleh media daring Tempo pada tataran dimensi teks (mikrostruktural). Penelitian ini tergolong kualitatif karena menganalisis data utama berupa teks berita yang diunduh dari situs Tempo.co dalam rubrik kolom dari 12 Mei 2023 - 22 Agustus 2024. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) model Norman Fairclough (1989), karena model ini dianggap tepat untuk menggambarkan cara

media merepresentasikan aktor dalam wacana politik dinasti. Fairclough membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi:

1. Dimensi teks (mikrostruktural): analisis linguistik meliputi pilihan kosakata, makna semantis, dan struktur sintaksis.
2. Dimensi praktik kewacanaan (mesostruktural): analisis proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks.
3. Dimensi praktik sosial (makrostruktural): analisis konteks sosial, budaya, dan kekuasaan yang melatarbelakangi teks.

Objek penelitian adalah seluruh pemberitaan politik dinasti pada media daring Tempo dalam rubrik Kolom 12 Mei 2023 - 22 Agustus 2024. Data yang dianalisis terdiri atas kata, frasa, klausa, dan kalimat yang menunjukkan representasi aktor dan peristiwa. Sebanyak 11 artikel pemberitaan media daring Tempo.co dalam rubrik Kolom dari 12 Mei 2023 sampai 22 Agustus 2024 bertema tentang politik dinasti dipilih melalui prosedur sampling purposive untuk dianalisis lebih lanjut.

Data dikumpulkan dengan metode simak dan catat (Sudaryanto. 2015), khususnya teknik simak bebas libat cakap, yaitu menyimak teks tertulis, dalam hal ini artikel di rubrik yang relevan di Tempo.co, lalu mencatat unit analisis (kata, frasa, klausa, kalimat) yang memuat unsur representasi. Kerangka penelitian ini menguraikan: Pertama, pilihan-pilihan leksikal dan struktur sintaksis dalam teks pemberitaan yang menekankan aktor atau peristiwa tertentu. Kedua, cara produksi dan sirkulasi narasi politik dinasti di platform daring Tempo. Ketiga, konteks sosial-politik yang membentuk dan dibentuk oleh wacana tentang politik dinasti dalam pemberitaan tersebut. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana media daring Tempo membangun citra politik dinasti melalui praktik kewacanaan dan pilihan tekstualnya (Eriyanto. 2022).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Dimensi Teks**

Analisis teks Pemberitaan media daring Tempo dinasti politik dalam dimensi mikro analisis wacana kritis menurut Fairclough (1989) terdapat tiga unsur yang menjadi dasar untuk menganalisis teks, yaitu hal yang berkaitan tentang representasi, aktor, dan identitas. Pada penelitian ini, dimensi mikro analisis akan dilihat melalui sudut pandang representasi yang dibagi menjadi dua kategori mikro analisis, yaitu :

#### **2. Representasi Aktor**

Salah satu aspek analisis yang digunakan untuk melihat representasi peristiwa pembunuhan ini adalah dengan memperhatikan penggunaan diksi dalam pemberitaan. Diksi tersebut merujuk pada orang atau kejadian, dalam bagian ini diksi merujuk pada peristiwa (Maharani. 2024).

Diksi yang merujuk pada peristiwa terbagi menjadi dua, yaitu diksi-diksi yang diduga menjadi penyebab pembunuhan dan ketika pembunuhan terjadi.

a. Representasi Joko Widodo

- (1) Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut akan mengikuti jejak sang ayah; kakaknya, Gibran Rakabuming Raka; dan kakak iparnya, Bobby Nasution, yang lebih dulu berkompetisi dalam pemilihan umum kepala daerah serta berhasil menduduki tampuk kepemimpinan di Surakarta, Medan, dan DKI Jakarta.
- (2) Mandeknya proses-proses politik di partai mendorong regenerasi politik yang tidak lazim atau anomali, seperti munculnya gerakan relawan yang mengantarkan terpilihnya Jokowi sebagai presiden, diusungnya Gibran, dan terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI.
- (3) Terlebih lagi bila bantuan sosial itu diberi embel- embel sebagai "bantuan Presiden" atau "bantuan Jokowi".
- (4) Bermodalkan populisme, Presiden Joko Widodo berhasil menjadikan anak dan menantunya sebagai pesona elektoral bagi partai politik.

Data (1) menunjukkan kemunculan Jokowi sebagai aktor dalam pemberitaan wacana dinasti politik di media daring Tempo. Dalam data ini Jokowi dirujuk dalam kaitannya sebagai ayah memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga untuk menjaga, mendidik, dan mengayomi anaknya, peran sebagai seorang ayah ini juga di aktualisasikan dalam konteks fungsinya sebagai kepala negara yang memberikan ruang kepada anak dan menantunya untuk ikut terjun dan berperan dalam kancah dunia politik.

Data (3) – (4) juga menunjukkan Jokowi sebagai kepala negara yang memiliki popularitas sebagai pemenang pemilu presiden selama dua periode memanfaatkan popularitasnya serta kekuatannya sebagai kepala negara untuk mendorong serta menaikan popularitas anak sulung dan menantunya. Hal ini dilakukan dengan harapan anak dan menantunya bisa dipilih dan diusung oleh partai politik pendukung pemerintahannya, agar memilih dan mencalonkan anggota keluarganya menjadi calon wali kota dalam pemilihan umum daerah. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun dinasti politik dalam pemerintahannya, dengan harapan keluarganya masih ada dalam politik meski dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden nantinya.

b. Representasi Gibran Rakabuming Raka

- (5) Setelah perubahan UU Pemilu mulus meloloskan anak sulung Jokowi menjadi calon wakil presiden, akal-akalan perubahan UU Pilkada ini tak boleh terulang.
- (6) Koalisi yang dipimpin Partai Gerindra itu akhirnya kompak mengusung Gibran, anak sulung Presiden Joko Widodo, untuk mendampingi Prabowo Subianto.
- (7) Mengetahui sepak terjang ibu negara Iriana Joko Widodo dalam mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden, kalimat itu layak diubah menjadi "di balik dinasti keluarga, ada ibu sebagai sutradaranya".

Data (5) Gibran adalah sosok yang disiapkan dan dikondisikan oleh ayahnya agar bisa ikut dalam kontestasi pemilihan umum sebagai Wakil Presiden meskipun pada awalnya usia Gibran belum memenuhi syarat batas minimal usia, akan tetapi Pak Jokowi sebagai kepala negara mengubah peraturan tersebut, sehingga Gibran bisa ikut dalam kontestasi bermodalkan perubahan undang-undang pemilu yang baru.

Predikat Gibran selanjutnya adalah sebagai Wakil Presiden / calon Wakil Presiden dalam data data (7) Gibran menjadi Wakil Presiden adalah aktor yang juga dipersiapkan atau didukung oleh ibunya, artinya majunya atau terpilihnya Gibran adalah memang sudah menjadi rencana keluarga besar dari Joko Widodo dalam membangun dinasti politik dalam pemerintahan. Media Tempo membangun atau mengkonstruksi wacana dinasti politik sebagai upaya dan langkah yang sangat negatif, opini negatif ini didasari pada fakta langkah-langkah Joko Widodo yang memberikan karper merah untuk anak dan anggota keluarga lainnya untuk ikut mengisi jabatan dalam pemerintahannya, ini disimpulkan sebagai peristiwa yang akan merusak sistem pemerintahan yang ada dan melwan semangat reformasi.

c. Representasi Bobby Nasution / Menantu

(8) Jokowi mengerahkan menantu, orang dekat, asisten, hingga ajudan istrinya maju dalam pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota.

(9) Jokowi adalah presiden pertama yang memiliki anak dan menantu wali kota.

(10) Menantu Jokowi, Bobby, juga berhasrat maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Aktor kedua dalam hal pembentuk wacana membangun dinasti politik adalah adanya peran menantu Joko Widodo, Tempo menempatkan Bobby sebagai salah satu anggota keluarga yang di masukan kedalam pemerintahan untuk membangun dinasti politik setelah anak sulungnya Gibran berhasil menjadi wali kota solo dan wakil presiden. Langkah pertama menantu Jokowi dinaiakn menjadi Wali Kota Medan. Dalam data (8), (9), (10) menantu Jokowi adalah sosok kedua yang disiapkan untuk membangun dinasti politik, itu semua menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden pertama yang memiliki anak dan menantu yang menduduki jabatan Walikota. Setelah berhasil menduduki jabatan Walikota, menantu Joko Widodo dalam data (10) berkeinginan untuk memperkuat posisinya untuk membangun dinasti politik dengan naik ke jabatan yang lebih tinggi sebagai Gubernur.

d. Representasi Kaesang

(11) Anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi ketua umum PSI. Cara mempertahankan kekuasaan

(12) Tafsir MA ini membuka peluang Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, bisa berlaga dalam pilkada.

Aktor ketiga dalam membangun dinasti politik adalah Kaesang atau anak bungsu. Tempo menggunakan nomina anak bungsu untuk menunjukkan posisinya dalam keluarga Joko Widodo. Selain itu Tempo juga menempatkan anak bungsu (11) sebagai aktor yang juga disiapkan dalam

membangun dinasti politik, langkah besar ini diawali dengan terpilihnya kaesang menjadi ketua umum PSI (Patai solidaritas Indonesia) dalam tempo waktu 3 hari sejak diterima menjadi anggota partai, bisa langsung menjadi ketua umum tanpa ada proses pemilihan, tentu ini adalah sebuah keistimewaan yang didapat karena pengaruh ayahnya sebagai Presiden dan posisi partai sebagai pendukung utama di pemerintahan mampu mepermulus jalan Kaesang terjun di dunia politik. Data (12) adalah langkah strategis selanjutnya yang dipersiapkan oleh Joko Widodo untuk memperkuat dinasti politiknya dengan mengubah undang-undang agar Kaesang bisa maju dalam pemilihan Walikota mengikuti jejak kaka dan kaka iparnya.

e. Aktor 5 : Paman Usman /Anwar Usman

(13) Putusan yang memuluskan jalan politik Gibran itu diambil Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman, paman Gibran.

(14) Hal yang mencurigakan, putusan sarat kejanggalan itu diketuk oleh Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik ipar Jokowi, atau juga bisa disebut sebagai paman Gibran.

(15) Empat Pelanggaran Berat Ketua MK Anwar Usman Versi Tim Advokasi Putusan MK itu juga mengubah ketentuan penting dalam pilkada, yakni batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat mendaftar.

Anwar Usman adalah tokoh atau aktor yang sangat berperan penting dalam pembangunan wacana dinasti politik yang dibentuk oleh Joko Widodo. dalam data (13) dan (14) Tempo menjelaskan peran utama Anwar Usman adalah sebagai Hakim di Mahkamah Konstitusi yang menjalankan peran untuk memberikan pengaruh kepada 8 hakim lainnya untuk menyetujui adanya perubahan UU nomer 90 tahun 2023 tentang batas usia calon Wakil Presiden. perubahan UU ini terealisasi karena Anwar Usman memiliki kewenangan dan pengaruh sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Peran Anwar Usman yang ikut memberikan putusan. Dalam data (15) tempo menjelaskan dan memberikan informasi bukti adanya konflik kepentingan Anwar Usman yang ikut memberikan putusan dalam perkara yang berhubungan langsung dengan keluarga. hasilnya Anwar Usman memang dicopot oleh Hakim Mahkamah karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam menerima dan mengubah UU nomer 90 tahun 2023.

f. Representasi Istri / Iriana

(16) Cawe-cawe Ibu Negara Iriana Jokowi dalam Pemilu 2024

(17) Keinginan Iriana belakangan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengubah pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum dengan menambahkan kalimat “pernah terpilih dalam pemilihan kepala daerah”.

(18) Selain menggalang keluarga besar, Iriana aktif meminta dukungan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan ikut cawe-cawe mengatur relawan Prabowo-Gibran.

Predikat kedua yang digunakan oleh tempo adalah perannya sebagai ibu negara dan ibu dalam keluarga. data (19) menunjukkan adanya peran iriana sebagai istri ikut terlibat langsung dalam upaya mendorong anak sulungnya (Gibran) agar bis aikiut kontettasi dalam pemilu presiden tahun 2024. Ibu Iriana sebagai istri dan ibu Gibran juga memiliki peran yang tidak bisa dianggap sepele, hal itu ditekankan dalam data (20), (21) dimana keinginan ibu iriana sejalan dengan dinamika politik yang ada termasuk keinginan agar anaknya ikut mencalonkan diri dalam pemilu presiden pada tahun 2024 dengan adanay putusan Mahkamah Konstitusi yang mengub isi pasal 169 poin Q, tentang syarat wakil Presiden.

### 3. Representasi Peristiwa

Analisis tahap kedua yang dapat digunakan untuk melihat representasi peristiwa dinasti politik dengan menganalisis pemilihan diksi dalam sudut pandang pemberitaan. Diksi yang digunakan merujuk pada personal atau peristiwa, dalam aspek ini diksi digunakan merujuk pada peristiwa. Diksi yang merujuk pada peristiwa secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu diksi-diksi yang merujuk kepada prkatik-praktik yang mendukung terbentuknya peristiwa dinasti politik.

#### a. Raja

(19) Ambisi Iriana Jokowi itu merupakan panci yang bertemu dengan tutupnya: Jokowi yang tak ingin kehilangan takhta, calon presiden yang sekadar ingin berkuasa, partai yang membebek “raja”, dan para pendukung yang gelap mata.

Data (22) menjelaskan bagaimana kedudukan Jokowi dalam kontek kekuasaan, jokowi tidak mau kekuasaannya hilang sehingga dengan kekuatan yang dia miliki memaksa partai politik untuk tunduk dan patuh serta menjadikannya sebagai figur raja dalam sistem pemerintahan dinasti diman titahnya adalah hukum atau aturan yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali.

#### b. Cawe-cawe

(20) Suami yang tak membatasi peran istri, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya tengah membuka pintu dipraktikkannya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(21) Ditengarai ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo yang mendorong terbentuknya dinasti politik Jokowi baru.

(22) Setelah secara telanjang cawe-cawe memenangkan anaknya dalam pemilihan presiden 2024, kini ia bersiap cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini.

Peristiwa lainnya digambarkan dengan diksi ‘Cawe-cawe’, istilah ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang menjelaskan dirinya akan ikut campur atau terlibat langsung dalam pemilihan umum dan calon-calon yang akan maju dalam pemilu, data (23) dan (24) menjelaskan upaya terbuka dalam memebntuk dinasti politik, termasuk di dalamnya uoaya memajukan serta mendukung pasangan Prabowo dan Gibran agar bisa menang dalam pemilu presiden tahun 2024. Data (25) menjelaskan keberhasilan upaya ‘cawe-cawe’ memenagkan

anakny akan diteruskan dengan ‘cawe-cawe’ dalam pemilihan kepala daerah dimana dalam pemilihan kepala daerah ada menantunya (Bobby Nasution) yang ikut mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Sumatra Utara.

c. Politik Elektoral

(23) Efek utama Jokowi adalah mengubah konstelasi politik elektoral, khususnya perihal pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden yang selama dua dekade reformasi dikendalikan oleh partai politik secara eksklusif.

(24) Partai-partai yang memperebutkan anak dan menantu Presiden juga berharap mendapatkan efek ekor jas popularitas Jokowi, yang tetap mendapatkan skor tinggi dalam sejumlah survei. Alih-alih menjadi alat demokrasi, partai-partai kian terbenam dalam kubangan politik elektoral.

(25) Personalisasi politik mendorong terbentuknya koalisi partai berdasarkan popularitas calon ketimbang kerja sama berbasis isu atau platform politik.

Peristiwa lain yang menjelaskan wacana dinasti politik adalah dengan penggunaan diksi ‘popularitas Jokowi’ dalam data (23) diksi ini digunakan untuk merepresentasikan partai politik yang ada (parti pendukung pemerintah) hanya membebek kepada Jokowi, partai politik harusnya menjadi alat reproduksi pemimpin atau calon-calon baru pemimpin pemerintahan. Akan tetapi kondisi ini justru berbanding terbalik, dalam data (24) dan (25) partai yang ada malah mengekor kepada kekuasaan dan menjadikan anggota keluarga Joko Widodo sebagai kader partai, mereka tergiur oleh efek elektoral atau popularitas yang dimiliki oleh Joko Widodo dan mengabaikan tugas-tugas kepartaian dalam upaya memberikan kesempatan kepada kader-kader partai atau mengusung kader terbaik dari partai untuk maju mencalonkan diri menjadi pejabat publik, baik dalam tingkat Bupati/Walikota, Gubernur, serta Presiden dan Wakil Presiden.

d. Asosiasi Keluarga

(26) Dari banyak dinasti politik, mungkin dinasti politik Jokowi yang mulai mengasosiasikan "merek" keluarga mereka dengan kualitas tertentu yang diapresiasi oleh pemilihnya.

(27) Asosiasi nama keluarga dengan kualitas tersebut bukan alasan untuk bersikap apologetik atau pembelaan terhadap politik dinasti. Namun harus diingat bahwa saat ini pilihan publik sangat terbatas untuk melawan politik dinasti.

(28) Memaksa dinasti politik untuk mengasosiasikan nama keluarganya dengan kualitas tertentu adalah sebuah pilihan rasional untuk terus menekan mereka agar lebih mementingkan kepentingan rakyat dan menghindari tindakan-tindakan predatori yang didorong oleh kepentingan jangka pendek.

Penggunaan ‘Asosiasi Keluarga’, diksi ini digunakan dalam (26), (27) dan (28) dengan tujuan menjelaskan upaya yang dilakukan Joko Widodo dalam menjual dan mengajukan

anggota keluarganya untuk dipinang oleh-pertai-partai politik seperti Gibran, Bobby, Kaesang dan dipilih menjadi calon-calon dalam pemilihan umum, dengan adanya jaminan Joko Widodo sebagai sosok ayah yang memiliki popularitas, kekuatan politik, sumberdaya materi yang melimpah. Semua itu tentu cukup untuk membuat partai-partai pembebek kekuasaan tergiur, karena memiliki jaminan sosok Presiden yang mampu mengerahkan semua aparaturnegara untuk mendukung dan menmenangkan anggota keluarganya.

e. Paranoia

(29) Menempatkan anak keturunannya sebagai calon wakil presiden adalah wujud paranoia dan ketidakpercayaan diri Jokowi-sesuatu yang personal tapi secara fundamental merusak demokrasi.

(30) Menempatkan anak sebagai calon wakil presiden wujud paranoia Jokowi. Kepentingan personal yang merusak demokrasi.

Paranoia adalah diksi yang digunakan oleh media Tempo untuk menjelaskan kondisi Joko Widodo sebagai presiden memiliki tujuan untuk memperpanjang atau mempertahankan kekuasaannya, data (43) dan (45) menjelaskan upaya memajukan anggota keluarga Gibran sebagai calon wakil presiden adalah wujud rasa ketakutan Presiden secara personal yang akan segera menaggalkan jabatannya, dengan terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden merupakan upaya yang dilakukan agar pengaruhnya dan kekuasaannya tidak hilang.

#### 4. Analisis Dimensi Meso

a. Produksi Teks

Profile Pemilik Media tempo Goenawan Soesatyo Mohamad (lahir 29 Juli 1941) beliau adalah seorang penyair, esais, penulis naskah drama, dan editor Indonesia. Beliau adalah pendiri dan editor majalah Indonesia Tempo. Goenawan adalah pemimpin editorial media tempo merupakan sosok yang dikenal sebagai pihak pengkritik yang sangat vokal terhadap pemerintahan Indonesia, karya jurnalistik Tempo sebagai media sering mengalami intimidasi dari pihak yang tidak sejalan dengan wacana-wacana yang disebarluarkan oleh tempot. Tempo telah beberapa kali mengalami pelarangan, itu semua terjadi karena kritik-kritiknya yang tajam kepada penguasa pemerintah.



Gambar 1. Judul Pemberitaan Tempo tentang Dinasti Politik

Pemberitaan media daring Tempo dalam membuat artikel politik dinasti tentu memiliki sudut pandang yang khas, itu semua terjadi karena Tempo dikenal sebagai media yang sangat keras dalam mengkritik pemerintah, gambar (1) memperlihatkan judul-judul pemberitaan Tempo melalui platform media daring (online). Artikel media Tempo selalu disertai ilustrasi gambar atau karikatur sebagai tampilan laman muka pemberitaan yang disertai dengan judul utama artikel pemberitaan. Ilustrasi-ilustrasi yang menampilkan "wajah" pada setiap berita mempunyai maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan apa yang ada di dalamnya.



Gambar 2. Ilustrasi Pemberitaan Tempo tentang Dinasti Politik

Ilustrasi Gambar (2) merupakan contoh ilustrasi-ilustrasi yang dibuat oleh media daring Tempo pada pemberitaan-pemberitaan tentang dinasti politik, mayoritas ilustrasi dalam contoh di atas menggambarkan dinasti politik direpresentasikan kepada Presiden Joko Widodo beserta anggota keluarganya, artikel dan ilustrasi ini dipastikan telah melewati proses seleksi dari dewan reaksi dan tim editorial media Tempo sebelum disebar luaskan melalui sarana penyebaran yang dimiliki (Maghvira, 2017) dalam hal ini menyatakan bahwa dalam proses produksi Tempo tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terdapat rangkaian di dalamnya seperti wartawan, redaksi berita, sampai editor termasuk dalam rubrik kolom editorial dengan mayoritas tulisan berasal dari penulis luar yang memiliki kesepakatan opini dengan media Tempo.

b. Konsumsi teks

Wacana politik dinasti mendapatkan perhatian masyarakat secara luas terutama dikalangan akademisi kampus, hal ini terjadi karena isu dinasti politik sangat erat kaitannya dengan perlawanan politik kaum muda dengan sejarah panjang di Indonesia. Masyarakat mengkonsumsi berita tentang dinasti politik karena wacana pemberitaan ini melibatkan Presiden dan anggota keluarganya, nepotisme juga salah satu isu sensitif dalam pemerintahan Indonesia terutama selama masa orde baru. Media daring Tempo secara simultan memberikan perhatian dan terus menyoroti wacana dinasti politik untuk terus mendapatkan perhatian dan

sorotan masyarakat. Media Tempo mempublikasikan berita diansti politik keluarga Joko Widodo dengan tujuan wacana ini tidak hilang dan terus menjadi sorotan publik, artikel-artikel tempo tentang dinasti politik Joko Widodo disimpan dalam kolom arsip dengan maksud artikel tersebut tidak hilang dan tersimpan dengan baik, selain itu juga dengan tujuan publik bisa mengakses artikel-artikel tersebut secara terbuka.

Gambar atau ilustrasi yang menyertai judul artikel senantiasa berhubungan dengan tema utama pemberitaan. Ilustrasi pada 23 Oktober 2023 memperlihatkan Joko Widodo sedang mengusung atau mengangkat anak pertamanya (Gibran) di atas podium, di belakang podium tersebut ada sosok Prabowo Subianto, ilustrasi ini bisa diartikan bahwa Pak Joko Widodo sedang mempromosikan anaknya bersama Prabowo untuk didukung oleh masyarakat sebagai penerus yang akan melanjutkan kekuasaan. Tempo Media atau laman tempo.co memiliki beberapa platform media untuk menyebarkan produknya, produk-produk yang dihasilkan PT Tempo Inti Media khususnya Tempo online menggunakan sarana media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Untuk mendapatkan akses penuh terhadap produk-produk jurnalistik media Tempo, baik berupa aplikasi digital dan laman tempo.co, konsumen harus berlangganan dengan tarif Rp64.380,00 setiap bulan.

## 5. Analisis Dimensi Makro

### a. Situasional

Secara makro struktural banyaknya perubahan aturan yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait penambahan persyaratan batasan usia calon wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi yang hakim ketuanya dipimpin langsung oleh Pak Jokowi (Anwar Usman) atau paman Gibran yang memberikan jalan mulus untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024, penerimaan pendaftaran Calon Wakil Presiden tanpa merubah Undang-undang PKPU oleh Komisi pemilihan Umum Pusat, perubahan ambang batas usia calon pemimpin daerah untuk memuluskan Kaesang dalam pencalonan Walikota, penempatan Gibran sebagai Walikota Solo, naiknya Kaesang menjadi ketua partai politik PSI, Rencana perubahan Undang-Undang pemilku yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR untuk menetapkan syarat pencalonan gubernur dan Walikota harus berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung merubah Syarat batas usia pencalonan peserta pemilihan umum daerah Gubernur dan Walikota menjadi batas usia 30 tahun ketika mendaftar menjadi ketika di lantik

### b. Institusional

Pengaruh akses yang dimiliki oleh komunikator dan bagaimana wacana dikonstruksikan dalam masyarakat. Goenawan Mohamad adalah salah satu penggagas berdirinya majalah Tempo. Kiprahnya di dunia media dan jurnalistik kini membawanya sebagai seorang yang berpengaruh dan mendominasi dalam setiap pemikirannya dalam menggiring opini khalayak. Wacana yang hendak disampaikan GM dalam setiap teksnya di rubrik Catatan Pinggir majalah

Tempo adalah menghendaki kebebasan dan keadilan setiap individu. Penekanan pada nilai keberanian untuk hidup bebas dan merdeka adalah sebuah pesan-pesan yang masih disuarakan oleh GM. Melihat masih adanya ketimpangan sosial dan para oknum yang membungkam orang lain adalah alasan utama teks-teks ini diproduksi. majalah Tempo dan GM mendapatkan dominasi untuk melakukan kontrol wacana publik dan juga sebagai sarana legitimasi kekuasaan.

Tempo sebagai institusi media masa memiliki prinsip TARIF, yang didefinisikan sebagai *transparency, accountable, responsip, independen, dan fairness*. Independen adalah salah satu prinsip penting yang harus dipegang kokoh oleh media masa, artinya dalam setiap penulisan produk-produk jurnalistik berita wartawan Tempo harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Tempo dengan segala aspek kepentingan internal baik dari pemilik modal, dewan redaksi atau pemilik saham harus mampu menjaga Independensi dan juga etika jurnalistik, meskipun dalam aspek pembentukan wacana tentu tidak terlepas dari pengaruh goenawan Muhamad sebagai editorial, akan tetapi secara profesional Tempo tetapi mampu menjaga kualitas pemberitaan dalam wacana dinasti politik yang di representasikan kepada keluarga Presiden Joko Widodo

#### c. Sosial

Peran pers di Indonesia dalam kondisi paling mutakhir memang masih jauh dari cita-cita reformasi yang menghendaki adanya "kebebasan pers" yang merupakan bagian dari empat pilar demokrasi di Indonesia, itu semua dikarenakan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini secara faktual justru dapat mengekang atau membungkam para jurnalis dalam membuat produk jurnalistik, fakta temuan dengan meningkatnya loran terhadap jurnalis itu semua diikuti dengan menurunnya angka indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional. Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2024 menunjukkan penurunan ke angka 69,36 dibandingkan tahun 2023 yang berada di 71,57. Ini merupakan fakta penurunan yang ekstrim jika dibandingkan dengan IKP pada tahun 2022 yang mencapai 77,88.

### **D. Simpulan**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam tataran dimensi teks adanya peran aktor yang direpresentasikan oleh media daring Tempo sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan wacana dinasti politik dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough dalam tataran dimensi teks dari segi representasi aktor terdapat enam aktor yaitu Joko Widodo, Gibran Rakabumng Raka, Bobby Nasution, Anwar Usman, Kaesang Pangarep, dan Iriana Jokowi. adapun dari segi representasi peristiwa, media daring Tempo menggunakan diksi Raja, Cawe-cawe, Politik Elektoral, Asosiasi Keluarga, Paranoia sebagai bentuk

representasi peristiwa dalam wacana dinasti politik sehingga secara representasi Tempo menempatkan Joko Widodo dan keluarganya mendapatkan sentimen yang negatif (Andi Anggana dkk. 2024)

Di tataran dimensi meso struktural Tempo memperlihatkan sikap kritis dan penolakan atas kebijakan dan langkah-langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan upaya membentuk dinasti politik dengan menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politik, sikap kritis itu ditunjukkan dengan puluhan judul artikel tentang dinasti politik Jokowi yang ditulis khusus oleh Tempo dalam kurun waktu 2020 sampai 2025. Dalam tataran dimensi Makro struktural Tempo menyoroti setiap peristiwa-peristiwa penting apa saja yang merupakan situasi agenda setting untuk mengkondisikan keberhasilan dinasti politik Jokowi dengan aman dilanjutkan oleh anak dan menantunya.

Kesimpulan dari tiga dimensi mikro, meso dan makro, Media Tempo memiliki ideologi dan kecenderungan untuk merepresentasikan Joko Widodo sebagai sosok dengan citra negatif, opini negatif ini ditunjukkan dengan cara-cara, upaya, langkah-langkah serta tokoh, aktor, yang terlibat dan membangun dinasti politik.

## Daftar Pustaka

- Agus Dedi. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8 (1), 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Anggana, A., Al Aslah, A., & Ramadhan, R. R. (2024). Analisis Framing Dan Sentimen Media Daring Terhadap Isu Dinasti Politik Keluarga Jokowi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume XIV No.*
- Aulia, S. S., Pitakon, F. A., & Kunci, K. (2023). *Multidisciplinary Science Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi : Grand Corruption*. 1(5), 1044–1052.
- Era Bawarti. 2014. Laman Muka Blog koinkeadilan.com sebagai Bagian dari Gerakan Koin Peduli Prita Tahun 2009 (Analisis Wacana Kritis). Vol. 2 No. 4
- Eriyanto. (2003). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (N. A, Ed.; II). LKiS.
- Eriyanto. (2022). Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus (Corpus-Assisted Discourse Studies/CADS). PT Remaja Rosdakarya.
- Fairclough, N. (1989). Language and power. Longman Group.
- Farika, F., Akbar, A. M., & Ardiana, H. R. (2023). Analisis Problematika Peraturan Hukum Yang Melanggengkan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. 1(4), 369–378.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Huda, A., & Jamil, D. (2023). *Degradasi Demokrasi Lokal : Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu*. 3, 5161–5171.
- Imas Novita J dkk: 2020. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. Vol. 7, No. 6
- Kritis, T., Dinasti, P., & Indonesia, D. I. (2020). *Tinjauan kritis politik dinasti di indonesia*. 8, 177–191.

- Maharani, E. A., Wagiyati, W., & Darmayanti, N. (2024). Representasi peristiwa dan aktor dalam kasus ferdy sambo pada koran tempo: analisis wacana kritis berbasis korpus. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 14(1), 360-374.
- Muhamad Mukhroji. 2016. Critical Discourse Analysis On TV Program Of Indonesian Lawyer Club In Perspectiv Of Norman Fairclough (Execution of General Susno Duaji). Vol. 8, No. 1
- Muhammad Iqbal Husein. 2021. Analisis Wacana Kritis Berita Konflik Di Media Ambon Ekspres dan Siwalima. Vol.1No. 9
- Norman Fairclough. (1995). *Media Discourse*. (oxford university Press)
- Norman Fairclough. (2003). *Analysing Discourse. Textual Analysis For Sociol Research*. Routledge
- Norman Fairclough. (2010). *Critical Discourse Analysis, The critical Study of language*. (2th ed). Routledge
- Pane, I. (2024). *Politik Dinasti Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*. 02(1), 13–24. <https://doi.org/10.32884/jih.v2i1.1643>
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260–2269.
- Rai Bagus Triadi dkk. 2020. Konstruksi Sarkasme Media Massa Online di Indonesia: Judul Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Reynhard Sinaga. Vol. 10, No. 2..